

Sustainability Default

(KEBOHONGAN JANJI KEBERLANJUTAN)



Kebijakan pengendalian bank dan pembeli yang tidak efektif memungkinkan perusahaan kertas besar, APP mengabaikan komitmen konservasi hutan.



November 2020

Daftar Isi

Ringkasan eksekutif	3
Profil singkat perusahaan APP	6
Bagaimana APP gagal, meningkari, dan mundur dari komitmennya	10
Deforestasi	10
Konflik sosial	13
Kebakaran hutan dan gambut	15
Lahan Gambut dan Emisi CO ₂	17
Restorasi & kompensasi	18
Prosedur Asosiasi	19
Transparansi	20
Rekomendasi untuk Para Klien, Pemberi Modal, dan Investor APP	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2013, setelah bertahun-tahun merusak hutan hujan dan merugikan masyarakat lokal, Asia Pulp and Paper (APP) mengajukan permohonan untuk memulai dari awal. Kredibilitas APP yang berjanji akan memperbaiki tindakannya tercederai setelah APP mengingkari komitmennya sendiri untuk menerapkan zero deforestasi pada tahun 2004, 2007, dan 2009. Dengan sedikitnya hutan hujan yang tersisa di wilayah konsesi mereka di Sumatera yang izinnnya diterbitkan pemerintah pada tahun 2013, APP menyatakan bahwa kali ini mereka serius untuk berkomitmen pada standar-standar lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab.

Tujuh tahun setelah komitmen ini, APP tampaknya tidak lagi melakukan kerusakan besar-besaran atas hutan hujan Indonesia di dalam wilayah konsesinya. Tapi ini hanya menyelesaikan sebagian masalah. Sumber kayu utama mereka berasal dari satu juta hektar hutan tanaman (seluas 750.000 lapangan sepak bola), yang sebagian di antaranya ditanam pada lahan gambut bernilai karbon tinggi dengan risiko kebakaran ekstrem. Ratusan komunitas mengklaim hak atas tanah di dalam wilayah konsesi APP dan supliernya, menimbulkan konflik sosial yang tidak mampu untuk diselesaikan oleh masyarakat yang dieksploitasi perusahaan. Cara APP dalam mengatasi penyebab mendasar konflik sosial ini sangat tidak patut: mereka menolak untuk mengakui dan menghormati hak-hak adat masyarakat atas tanah di dalam wilayah konsesi APP dan gagal menerapkan mekanisme penyelesaian konflik dan pengaduan yang efektif atau memberikan ganti rugi yang berarti bagi masyarakat yang terdampak oleh hutan tanamannya. APP juga tidak merestorasi dan memulihkan kawasan hutan dan lahan gambut luas yang rusak selama masa pembangunan hutan tanaman kayu pulp skala industri miliknya.

Saat Anda melihat rangkaian material promosi yang diproduksi dan didistribusikan grup APP kepada pelanggannya di pasar-pasar utama produknya termasuk di seluruh AS, Eropa dan Jepang atau kepada para pemberi modal dan investornya, sangat mudah bagi Anda untuk berpikir bahwa APP, atau perusahaan afiliasinya, Grup Sinar Mas, telah mengatasi masalah ini. Bahkan, Anda mungkin digiring untuk berpikir bahwa APP menyelamatkan dunia dengan mencontohkan kepada perusahaan lain langkah-langkah menuju keberlanjutan. Ini semua adalah fatamorgana. Komitmen APP sebagian besar tetap tidak terpenuhi tujuh tahun setelah pendeklarasiannya; dan perbaikan di lapangan jauh tertinggal dibandingkan penyempurnaan dalam menciptakan persepsi bahwa kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan cara-cara berkelanjutan. Sampai hari ini APP tidak dapat menunjukkan melalui metode verifikasi independen yang kredibel bahwa mereka beroperasi sesuai dengan komitmen yang mereka buat dalam Kebijakan Konservasi Hutan.

APP mengklaim bahwa mereka memproduksi produk rendah karbon meskipun faktanya mereka membuat kertas dengan jejak karbon tinggi. Tingginya jejak karbon APP adalah akibat emisi karbon yang disebabkan oleh pembangunan dan kegiatan produksi hutan tanaman pulp yang terus berlangsung di lahan gambut yang dikeringkan. Emisinya sangat tinggi, terutama ketika lahan gambut terbakar – yang semakin sering terjadi dengan berlangsungnya siklus El Nino yang lebih kering. Kebakaran di konsesi APP, dan produsen minyak, pulp dan kertas lainnya, termasuk perusahaan sawit afiliasinya, Golden Agri Resources, menyebabkan bencana nasional pada tahun 2015 dan 2019 yang menimbulkan bom karbon dan dampak kesehatan dan ekonomi jangka panjang bagi jutaan orang di Indonesia maupun di negara tetangga. Bom karbon dan deforestasi untuk membuka hutan tanaman baru merupakan penyebab utama Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi polusi karbon terbesar di dunia. APP menanggapi krisis ini dengan mengklaim perusahaannya telah memulihkan 7000 hektar (ha) lahan gambut, atau sekitar 1% dari 700.000 ha wilayah konsesinya yang berada

di lahan gambut. APP juga gagal memenuhi komitmennya untuk melestarikan satu juta hektar hutan hujan dan ekosistem lainnya.

Terdapat bukti nyata bahwa hutan tanaman di lahan gambut yang kering berbahaya bagi iklim dan kesehatan masyarakat. Meski demikian, APP tidak membuat rencana yang kredibel untuk menghentikan pembangunan hutan tanamannya di lahan gambut yang dikeringkan – apalagi mengimplementasikan restorasi lahan gambut yang memadai di area-area yang kondisinya dapat semakin parah karena diabaikannya lahan gambut yang terdegradasi. Konflik lahan juga masih terjadi di lahan-lahan gambut yang masih harus direstorasi. Alih-alih mengembalikan lahan kepada masyarakat dan melakukan restorasi berbasis masyarakat, pembasahan (*re-wetting*), dan menyediakan mata pencaharian alternatif agar masyarakat dapat bertahan, APP memfokuskan upayanya pada lebih banyak penelitian tentang spesies lahan gambut alternatif, pemetaan lokasi dan kedalaman lahan gambut, dan meluncurkan kampanye Humas terkait program “*zero burning*” dan pelaporan kebakaran oleh masyarakat sekitar. Meski beberapa tindakan yang dilakukan APP memang diperlukan, APP telah gagal dalam ujian akhir untuk memulihkan lahan gambut kering pada skala yang sesuai untuk luas ruang lingkup masalah tersebut.

APP juga dikategorikan gagal dalam menangani masalah rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang sangat buruk, tidak menghormati hak-hak adat, serta penggunaan intimidasi atau kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak. Komitmen yang dibuat untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasok perusahaan tetap tidak terlaksana, meskipun APP mengklaim telah menyelesaikan “lebih dari setengah (51% berdasarkan penghitungan terakhir) dari konflik sosial yang dipetakan”. Klaim ini tidak sesuai dengan fakta yang diketahui LSM setempat yang membantu masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan keluhan mereka ke APP bahwa hanya ada beberapa kesepakatan yang telah disepakati. Meskipun berulang kali diminta untuk mempublikasikan rincian tentang klaim 51% ini, APP tidak mempublikasikan hasil pemetaan konflik lahannya, daftar semua konflik sosial yang diketahui dan diakui secara formal, atau membagikan data pendukung yang menampilkan jumlah konflik di ke-30 konsesinya dan status konflik yang ditangani dengan prosedur penyelesaian yang disepakati bersama.

Dan kini, pada tahun 2020, kami melihat sinyal-sinyal bahwa APP semakin melonggarkan kendali atas tindakan perusahaannya yang tidak bertanggung jawab. Pada bulan Februari, anak perusahaan APP, PT Wirakarya Sakti menyemprot tanaman pangan masyarakat setempat dengan herbisida setelah beberapa anggota masyarakat menghalangi perusahaan memperluas hutan tanaman kayu pulp di lahan mereka. Pada bulan Maret, seekor harimau



Sumatera langka terperangkap dan dibunuh di konsesi anak perusahaan APP lainnya. Dan pada bulan April, seorang anggota masyarakat lokal dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda setara enam belas tahun UMR karena anak perusahaan APP melaporkannya atas pembalakan liar ke penegak hukum setelah orang ini menebang dua puluh pohon di

area perkebunannya — penduduk desa menebang pohon yang mereka tanam di tanah adatnya tanpa persetujuan perusahaan.

Grup Sinar Mas merupakan penerima pembiayaan bank terbesar untuk komoditas yang berisiko merusak hutan di Asia Tenggara, dengan menerima pinjaman sebesar US\$ 19 miliar selama lima tahun terakhir (2015-2020): US\$ 14,3 miliar digunakan untuk kegiatan operasi pulp dan kertas, dan 4,5 miliar untuk kelapa sawit. Pemodal terbesarnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI), kedua bank ini tidak memiliki kebijakan publik yang melarang penerima kredit (klien bank) melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan gambut atau melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Bank besar asal Jepang, *Mizuho Financial Group* dan *Mitsubishi UFJ Financial Group* (MUFG) juga adalah pemberi modal yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, meskipun mereka menerapkan kebijakan lingkungan dan sosial untuk skema pembiayaannya sejak 2018.

Meski demikian APP tetap menjadi suplier produk pulp dan kertas ke pasar global yang sangat kontroversial. Terlepas dari rekam jejak kerusakan sosial dan lingkungan dan kegagalan perusahaan ini untuk menerapkan komitmennya di tahun 2013 pada seluruh lini operasinya dan dalam memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasi suplier atau perusahaan afiliasinya, APP tetap menjadi suplier, atau klien dari para pembeli utama pulp dan kertas serta internasional bank dan investor. Sejauh mana APP serius dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memulihkan dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan sosial yang disebabkan olehnya tergantung pada efektivitas pasar pembeli dan pelanggan ritel, pemberi modal dan penyedia pinjaman.

Laporan ini membuktikan bahwa setiap perusahaan yang masih melakukan bisnis dengan APP, dan Grup Sinar Mas, ikut terlibat dalam kerusakan yang ditimbulkan APP, suplier, dan perusahaan afiliasinya. Semua pengajuan pinjaman baru yang disetujui atau pengiriman pulp yang diterima pabrik kertas di seluruh dunia adalah kegagalan para pemodal, investor, dan produsen kertas dalam melakukan kewajiban mereka untuk menghentikan deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau berkontribusi pada perubahan yang sangat dibutuhkan dalam menanggapi krisis yang dihadapi iklim, keanekaragaman hayati dan para aktivis pembela Hak Asasi Manusia. Hal yang paling mendesak adalah para pelaku pasar ini harus berhenti memberi sinyal bahwa kampanye Humas APP, dan persepsi palsu yang mereka ciptakan, sudah mencukupi. Rasa percaya para pelaku pasar pada klaim yang menyesatkan dan kegagalan untuk menuntut verifikasi independen atas pelaksanaan komitmen APP, menghalangi terjadinya perubahan perilaku nyata di area yang paling penting—garis depan hutan di Indonesia. APP telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, tapi jalan masih panjang sebelum perusahaan ini dapat dianggap tidak lagi kontroversial.

Kegagalan APP dalam memenuhi komitmennya

- Dalam tujuh tahun, hanya sedikit kemajuan yang dicapai APP dalam merestorasi hutan atau lahan gambut yang rusak akibat pembangunan hutan tanaman industri, atau dalam menyelesaikan konflik sosial.
- Dalam dua tahun terakhir, APP ditemukan terlibat dalam deforestasi.
- Di tahun lalu, kebijakan yang diambil APP untuk memeriksa dan mewajibkan supliernya menghentikan deforestasi dihapus dari situs web perusahaan dan diganti dengan kebijakan baru yang tidak menerapkan persyaratan ketat zero deforestasi atau tanpa lahan gambut.
- Pada bulan Maret 2015 seorang petani dan aktivis lokal disiksa dan dibunuh secara brutal oleh petugas keamanan yang dikontrak perusahaan.
- Pada tahun 2020, perusahaan perkebunan di bawah APP memulai tindakan agresif terhadap masyarakat setempat yang masih menuntut hak atas tanah adat mereka dan

pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi, perusahaan juga tidak menghormati hak masyarakat untuk menolak pembangunan di tanah mereka dengan menggunakan intimidasi dan kriminalisasi.

Setelah bertahun-tahun melakukan berbagai langkah kecil, tidak bersikap, menunda, dan mengingkari janji, APP sekarang secara terang-terangan mundur dari komitmennya sendiri dan menggunakan metode lawas yang diterapkan di era 90-an untuk mengelola konflik sosial dalam memperluas perkebunannya yakni dengan cara mengintimidasi masyarakat lokal.



Beberapa Fakta Penting Untuk Diketahui Tentang Asia Pulp and Paper

Janji yang tidak ditepati: APP memiliki sejarah panjang terkait janji yang tidak ditepati.¹ Di tahun 2002, APP berjanji untuk menjaga lingkungan dan menyelesaikan konflik sosial, tapi kemudian janji ini dilanggar. Tahun 2006, perusahaan kembali menebangi hutan yang sebelumnya telah dijanjikan akan dilindungi.

Di era 1990-an, pabrik Indah Kiat milik APP menyatakan bahwa hutan tanamannya akan memasok “secara substansial” semua bahan baku kayu yang dibutuhkan pabrik pada tahun 2004. Namun, ketika waktu yang dijanjikan ini semakin dekat, APP dengan mudah menundanya ke tahun 2007. Setelah gagal lagi di tahun 2007, APP menunda lebih lanjut komitmennya hingga tahun 2009. Sepanjang periode itu, APP tetap menjadikan deforestasi sebagai metode pengadaan kayunya yang utama.²

Baru di tahun 2011 perusahaan mulai mengurangi deforestasi, dikarenakan hanya tersisa sedikit hutan alam yang bisa ditebang di luar kawasan konservasi. APP telah membuka sebagian besar hutan hujan di wilayah konsesinya. Di provinsi Riau, wilayah yang paling terdampak oleh perkebunan kayu pulp, APP menyisakan area seluas 22.000 ha, setelah menebang habis 713.383 ha hutan hujan (peraturan pemerintah mewajibkan 103.000 ha disediakan sebagai area konservasi).³

Komitmen: Pada Februari 2013, setelah dua dekade konflik lingkungan berlangsung, dan banyak perusahaan dan merek terkenal memutuskan hubungan komersial mereka dengan APP, APP mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan yang baru. Di antara komitmen-komitmen lainnya, kebijakan baru tersebut segera menerapkan moratorium penebangan di hutan alam dan lahan gambut pada semua supliernya. Perusahaan juga berkomitmen untuk melindungi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi dan hutan yang memiliki Stok Karbon Tinggi serta mengakui bahwa masyarakat adat dan lokal dapat memiliki hak adat atas tanah, yang tumpang tindih dengan izin hutan tanaman pulp APP.⁴

Selanjutnya, APP juga berkomitmen untuk memulihkan dan mendukung gerakan konservasi satu juta hektar hutan hujan, memperbaiki deforestasi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan menerapkan pengawasan ketat terhadap pelanggaran kebijakan ini pada supliernya. Meski kebijakan baru APP berhasil menahan laju deforestasi yang merajalela, selain beberapa kasus pelanggaran di Kalimantan dan Sumatera pada bulan-bulan awal penerapan komitmen ini, penebangan hutan masih terus dilakukan oleh pihak ketiga di kawasan yang dilindungi dan kerusakan parah di kawasan hutan akibat kebakaran hutan dan gambut masih terus terjadi.⁵

¹ Eyes on the Forests, The truth behind APP's greenwash, December 2011, <https://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Investigative-Report-The-truth-behind-APPs-greenwash.pdf>. WWF, WWF responds to ambitious APP plan for restoration and conservation of one million hectares, April 2014, http://assets.wwf.id/panda.org/downloads/letter_of_intent_final.pdf. WWF, Time is running out, http://assets.wwf.id/panda.org/downloads/time_is_running_out_4_app.pdf. WWF, APP hides destruction behind false advertisements, December 2006, https://wwf.panda.org/wwf_news/?83960/APP-hides-destruction-behind-false-advertisements.

² Christopher Barr, WWF, Profits on Paper: Political-economy of Fiber, Finance, and Debt in Indonesia's Pulp and Paper Industries, https://books.google.de/books/about/Profits_on_Paper.html?id=yOcsAQAAMAAJ&redir_esc=y. EPN and others, Open Letter to Financial Institutions, November 2012, https://www.banktrack.org/download/0_31/bank_letter_on_pulp_investment_nov_6.pdf. APP, Sustainability Report 2005-2006 <https://asiapulpandpaper.com/documents/20123/0/APP+Sustainability+Report+2005-2006.PDF/fbf9ffc1-8f70-6706-8f9e-84a438c1f6b5?t=1575880297932>.

WWF, Latest APP promise more greenwash than protection, May 2012, https://wwf.panda.org/wwf_news/?204893/Latest-APP-promise-more-greenwash-than-protection

⁴ RISI Info, <https://www.risiinfo.com/about-risi/resources/ppi-magazine/> [xi] APP, Forest Conservation Policy, February 2013, https://asiapulpandpaper.com/documents/20123/0/app_forest_conservation_policy_final_english_0.pdf/.

⁵ Eyes on the Forest, APP supplier continues forest clearance after moratorium, December 2013, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/kalimantan-forest-monitoring-consortium-app-supplier-continues-forest-clearance-after-moratorium>. EOF APP's supplier breaches moratorium clearance, May 2013, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/apps-supplier-breaches-moratorium-clearance-report-says>. Rainforest Alliance, An Evaluation of Asia Pulp & Paper's Progress to Meet its Forest Conservation Policy (2013) <https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP-Evaluation-Report-en.pdf>

PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN APP

Asia Pulp & Paper (APP) adalah salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, dengan produksi pulp, kertas, produk kemasan dan kapasitas konversi lebih dari 19 juta ton per tahun. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan terbesar di Indonesia, nama APP telah dikaitkan dengan deforestasi besar-besaran, pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap masyarakat lokal dan emisi gas rumah kaca sejak lama.

APP pada kenyataannya adalah jaringan perusahaan, yang dihubungkan oleh struktur perusahaan yang rumit dan tidak jelas. Beberapa perusahaan ini adalah bagian dari konglomerasi Grup Sinar Mas. Sementara sebagian perusahaan yang lain secara formal independen, tetapi masih dikendalikan oleh keluarga Widjaya dan beroperasi dengan strategi komersial yang sama. Sebenarnya, Asia Pulp & Paper adalah merek pasar, tidak ada perusahaan kertas yang terdaftar dengan nama ini. Beberapa hubungan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan ini sengaja disembunyikan, mungkin untuk alasan komersial atau fiskal, tetapi juga agar dapat menampik dihubungkan dengan deforestasi atau untuk tetap menggunakan sertifikasi *Forest Stewardship Council* setelah penggunaan sertifikasi oleh perusahaan-perusahaan ini dilarang oleh standar tersebut. Struktur yang tidak transparan ini juga telah dimanfaatkan untuk menghindari pembayaran utang sebesar US\$ 13,9 miliar ketika gagal bayar pada tahun 2001.⁶

Pada 30 Mei 2018, organisasi lingkungan Auriga melaporkan bahwa PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, yang dinyatakan APP sebagai perusahaan yang “dimiliki dan beroperasi secara independen”, memiliki hubungan dekat dengan Grup Sinar Mas, konglomerasi induk APP di dokumen pendaftaran perusahaan mereka. Kasus ini diselidiki lebih lanjut oleh portal Mongabay, yang menunjukkan lebih banyak bukti atas hubungan ini. APP dianggap sebagai anak perusahaan pulp dan kertas Grup Sinar Mas, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang sawit, pulp dan kertas serta *real estate*, jasa keuangan, agribisnis, telekomunikasi, dan pertambangan.

⁶ APP, About Us, <https://asiapulppaper.com/about-us>. Coalition Against Forest Mafia, Removing the Corporate Mask, May 2018, <http://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Removing-the-corporate-mask.pdf>. Greenpeace, Greenpeace slams APP/Sinar Mas over links to deforestation, ends all engagement with company, May 2018, <https://www.greenpeace.org/international/press-release/16535/greenpeace-slams-app-sinar-mas-over-links-to-deforestation-ends-all-engagement-with-company/>. The Standard, Greenpeace accuses wood certification group of being tool for timber industry, March 2018, <https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/1/104925/Greenpeace-accuses-wood-certification-group-of-being-tool-for-timber-industry>. WWF, APP's double default on creditors, March 2012, <https://wwf.panda.org/?203975/APPs-double-default-on-creditors>. ⁹ Coalition Against Forest Mafia, Removing the Corporate Mask. Mongabay, Paper giant denies secretly owning 'independent' suppliers, June 2018, <https://news.mongabay.com/2018/06/paper-giant-denies-secretly-owning-independent-suppliers/>. EPN, Forest products database, <http://ind-forestproducts.environmentalpaper.org>. Eyes on the Forest, The truth behind APP's greenwash, see footnote 12 ¹³ Eyes on the Forest, Asia Pulp & Paper/Sinar Mas Group Threatens Senepis Forest, Sumatran Tiger Habitat, and Global Climate, October 2008, https://assets.panda.org/downloads/appsenepisreport_oct08_final.pdf

Produk APP meliputi pulp kayu keras yang diputihkan, alat tulis, kertas cetak dan grafis, tisu, handuk kertas, kantong belanja, kemasan dan barang setengah jadi. Produk-produknya dijual secara global dengan berbagai merek seperti Enova, Fiora, Pursoft dan Riviera.

Anak perusahaan, afiliasi, atau merek lainnya antara lain Solaris Paper, Nippecraft, Collins Debden, Eagle Ridge Paper, Arco Paper & Print, PAK 2000, Mercury Paper, Livi, Imperia, dan PaperMax.

Melalui Paper Excellence, grup perusahaan kertas di luar Sinar Mas, namun dimiliki oleh keluarga Widjaya, APP juga mengendalikan sejumlah perusahaan kertas seperti Tembec Saint-Gaudens dan Tarascon (Prancis), Eldorado (Brasil), pabrik pulp Mackenzie, Howe Sound, pabrik Prince Albert, (eks. Domtar), Northern Pulp Nova Scotia, Northern Timber dan Catalyst Paper (Kanada). Pabrik pulp dan kertas APP-China sekarang termasuk Ningbo, Goldeast Paper, Ningbo Asia, Gold Huasheng, Gold Hongye, Global Paper Solutions, Hainan Jinhai Pulp and Paper, dan Guangxi Jingui Pulp & Paper, Jinmei Industrial and Universal Sovereign Trading. Daftar merek dan perusahaan terkait yang lebih lengkap tersedia di situs web TPN.

APP secara historis bertanggung jawab atas deforestasi pada lahan seluas lebih dari 2 juta hektar, termasuk habitat harimau, gajah, dan orang utan. Di satu wilayah penelitian saja, suplier Grup Sinar Mas diketahui telah menyebabkan 1,4 juta hektar habitat harimau musnah antara tahun 1995 dan 2008/2009. Ekspansi APP dan perampasan lahan dari masyarakat lokal menimbulkan ratusan konflik sosial, beberapa di antaranya ditangani dengan kekerasan brutal. Perusahaan bahkan pernah terlibat dalam pemekeraan anak. Dari deforestasi dan pengeringan gambut, emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan APP diperkirakan setara besaran emisi 165 negara di seluruh dunia (86 juta ton), hanya dari pembukaan hutan alam di kawasan lahan gambut.⁷

APP juga diduga terlibat dalam perizinan konsesi ilegal melalui praktik korupsi. Meski perusahaan yang terlibat belum dinyatakan bersalah, mantan Gubernur Riau divonis 14 tahun penjara atas korupsi: mantan Gubernur, lima pejabat pemerintah provinsi, serta dua mantan bupati, dinyatakan bersalah terkait pemberian izin konsesi perusahaan kayu pulp (Mitra Tani Nusa Sejati, Rimba Mutiara Permai, Selaras Abadi Utama, Bhakti Praja Mulia, Putri Lindung Bulan, Mitra Hutani Jaya, Satria Perkasa Agung dan Seraya Sumber Lestari). Konsesi-konsesi ini terkait dengan APP dan APRIL (Asia Pacific Resources International Limited), pesaing APP.

⁷ Rainforest Alliance, An Evaluation of Asia Pulp & Paper's Progress to Meet its Forest Conservation Policy (2013) and Additional Public Statements, February 2015, <https://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP-Evaluation-Report-en.pdf>. Amnesty International, INDONESIA: INVESTIGATE FORCIBLE DESTRUCTION OF HOMES BY THE POLICE IN RIAU, December 2008, <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2008/12/indonesia-investigate-forcible-destruction-homes-police-riau-20081223/>. Eyes on the Forest, Child labour in APP's main supplier revealed, June 2013, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/child-labour-in-apps-main-supplier-revealed>. RAN, Asia Pulp and Paper Caught Clearing Rainforest: Credibility of APP Deforestation Moratorium in Doubt, June 2013, <https://www.ran.org/the-understory/asia-pulp-and-paper-caught-clearing-rainforest-credibility-of-app-deforestation-moratorium-in-doubt/>. Eyes on the Forest, Ex-Riau Governor sentenced to 14 years for corruption, March 2014, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/exriau-governor-sentenced-to-14-years-for-corruption>. RISI Info, Greenpeace supports Asia Pulp & Paper's commitment to end deforestation in Indonesia, February 2013, <https://technology.risiinfo.com/environment/asia-pacific/greenpeace-supports-asia-pulp-papers-commitment-end-deforestation-indonesia>. FSC, Update on the disassociation of the Forest Stewardship Council from Asia Pulp and Paper (APP), June 2009, https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2019-06/FSC_Update%20%231%20-%20Status%20of%20disassociation%20from%20APP_2013-10-29_5.pdf

Selama dua dekade terakhir, korupsi, kerusakan ekologi, dan konflik sosial dengan masyarakat membuat LSM lokal dan internasional berkampanye menuntut reformasi dan menyebabkan pembatalan lebih dari 100 kontrak bisnis akibat masalah ini. Perusahaan-perusahaan yang telah menghentikan atau menghindari pengadaan dari APP sejak tahun 2000 diantaranya adalah Adidas, Disney, Fuji, Gucci, Hasbro, Kraft, Lego, Levis, Marks & Spencer, Mattel, Office Depot, Scholastic, Tesco, Tiffany & Co., United Stationers, Unilever, Volkswagen, Wal-Mart, Woolworths dan Xerox. Selain itu, *Forest Stewardship Council* (FSC) memutuskan hubungan dengan APP akibat praktik kehutanannya yang merusak dan kurangnya transparansi.

Pembatalan kontrak ini membuat APP mengajukan komitmen formalnya pada tahun 2013 dengan Kebijakan Konservasi Hutan yang baru dan janji-janji lainnya.



BAGAIMANA APP TELAH GAGAL, MENINGKARI, DAN MUNDUR DARI KOMITMENNYA

Di bawah ini adalah beberapa komitmen utama yang secara substansial gagal diterapkan oleh APP, diabaikan begitu saja, dilanggar atau dihapus secara diam-diam dari situs webnya.

DEFORESTASI

“Mulai 1 Februari 2013 semua pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara penilaian HCV dan HCS diselesaikan. Pembukaan area yang diidentifikasi sebagai hutan tidak boleh dilanjutkan.”

Kebijakan Konservasi Hutan

Ketika pada Februari 2013 APP berkomitmen untuk menghentikan deforestasi, beberapa suara kritis menyatakan bahwa perusahaan akhirnya menghentikan deforestasi karena semua area hutannya telah habis dan diubah menjadi hutan tanaman pulp yang dibutuhkan untuk menyuplai pabriknya.

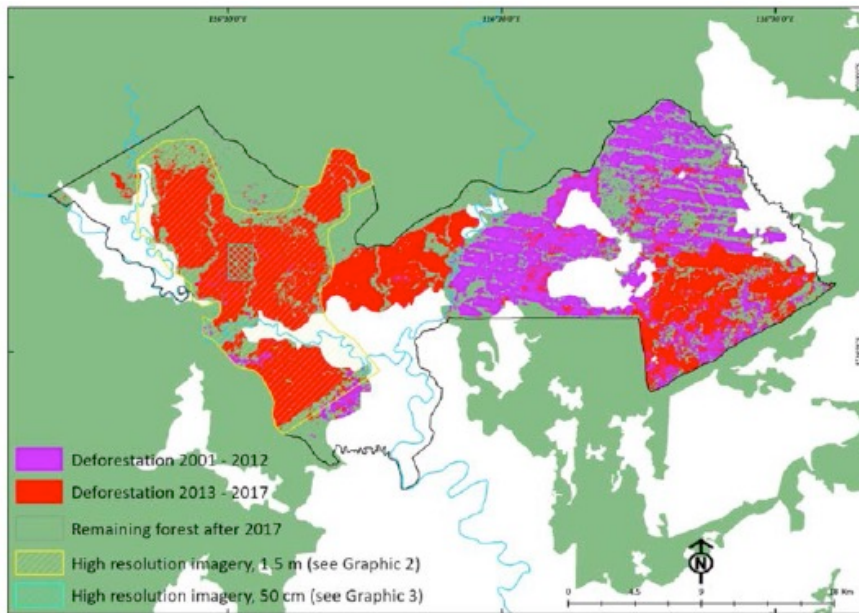
Meski demikian, sebelum meluncurkan komitmen untuk menghentikan deforestasi pada Februari 2013, APP justru meningkatkan laju deforestasi ke tingkat yang tidak lestari bahkan

bagi pabriknya sendiri: kayu-kayu gelondongan bertumpuk di sepanjang jalan konsesinya dibiarkan membusuk.

Pada saat yang sama, sembari berkomitmen untuk mengakhiri deforestasi, APP meningkatkan kapasitas pabrik pulpanya sebesar 50% dengan membangun pabrik baru di Sumatera Selatan. Apakah pabrik tersebut sejalan dengan komitmen baru APP? Seperti yang dilaporkan oleh LSM-LSM dalam analisis terperinci, peningkatan kapasitas pabrik ini tentu akan membuat APP membutuhkan lebih banyak serat kayu, yang pada akhirnya akan kembali bersumber dari deforestasi atau perampasan lahan. Dan menurut LSM lokal, APP masih berusaha untuk “memperluas” hutan tanamannya atau menambah bahan baku dengan skema-skema pembajakan perkebunan masyarakat setempat.⁸

⁸ APP, APP’s Forest Conservation Policy, February 2013, https://asiapulppaper.com/documents/20123/0/app_forest_conservation_policy_final_english_0.pdf/. EPN, Indonesian NGO doubting on zero-deforestation commitment, January 2014, <https://environmentalpaper.org/2014/01/indonesian-ngo-doubting-on-zero-deforestation-commitment/>. Wetlands International, Will Asia Pulp & Paper default on its “zero deforestation” commitment?, April 2016, <https://www.wetlands.org/publications/will-asia-pulp-paper-default-on-its-zero-deforestation-commitment/>. Eyes on the Forest, NGOs leave APP-backed conflict resolution forum, December 2019, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/ngos-leave-appbacked-conflict-resolution-forum>. Associated Press, Greenpeace: Paper giant cut forests during conservation pact, May 2018, <https://apnews.com/article/cb89a14d6dd547108f33b0f04d16a3d8>. Greenpeace, This company promised to stop deforestation. But we caught them out, May 2018, <https://www.greenpeace.org/international/story/16597/this-company-promised-to-stop-deforestation-but-we-caught-them-out/>. ²⁷ Associated Press, Pulp giant tied to companies accused of fires, December 2017, <https://apnews.com/article/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>. ²⁸ The Straits Times, Rebutting media reports, pulp giant APP claims links to suppliers do not weaken its sustainability efforts, December 2017, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rebutting-media-reports-pulp-giant-app-claims-links-to-suppliers-do-not-weaken-its>. Walhi and others, APP and APRIL violate zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan, August 2018, <https://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/08/APP-and-APRIL-violate-zero-deforestation-policies-August-15-2018.pdf>. ³⁰ APP, Sustainability Report 2018, https://asiapulppaper.com/documents/20123/0/app_sustainability_report_2018_4.pdf/61b398db-f38a-70e7-aa8b-718e99be24b5?t=1575879997939. Greenpeace, Critically endangered Sumatran tiger tragically killed in a trap, June 2018, <https://www.greenpeace.org/malaysia/story/3388/critically-endangered-sumatran-tiger-tragically-killed-in-a-trap/>. Mongabay, Video: Tiger trapped in Asia Pulp and Paper logging concession dies a gruesome death, July 2011, <https://news.mongabay.com/2011/07/video-tiger-trapped-in-asia-pulp-and-paper-logging-concession-dies-a-gruesome-death/>. IUCN, Sumatran Tiger, <https://www.iucnredlist.org/species/15966/5334836>. WWF, APP’s forest clearing linked to 12 years of human and tiger deaths in Sumatra, March 2009, https://www.panda.org/wwf_news/?159162/APPs-forest-clearing-linked-to-12-years-of-human-and-tiger-deaths-in-Sumatra

Analisa citra satelit konsesi PT Fajar Surya Swadaya di Kalimantan Timur yang mengindikasikan terjadinya deforestasi selama 2001-2007 danutupan hutan alam yang tersisa.

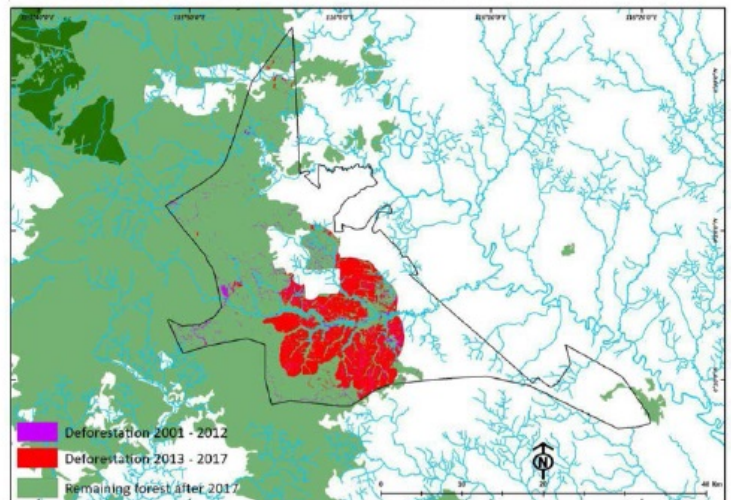


Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan dkk. 2018, APP dan APRIL melanggar kebijakan zero deforestasi dengan membeli kayu dari konsesi Grup Jarum di Kalimantan Timur, 15 Agustus. <http://www.panda.org/g/7333258/APP-and-APRIL-violate-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-Djarum-Group-concessions-in-East-Kalimantan>.

Keprihatinan LSM ini terbukti cukup beralasan berdasarkan investigasi *Associated Press* terhadap perusakan hutan yang diperbuat perusahaan yang diterbitkan pada Mei 2018.

Setelah investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace, penelitian lebih lanjut oleh *Associated Press* dan *Straits Times* pada tahun 2017 menemukan bahwa PT. Muara Sungai Landak di Kalimantan Barat, yang terus membuka hutan alam dan lahan gambut di Kalimantan Barat antara tahun 2014 dan 2017, beraliansi dengan APP melalui Sinar Mas Forestry.

Analisa citra satelit konsesi PT Silva Rimba Lestari di Kalimantan Timur yang mengindikasikan terjadinya deforestasi selama 2001-2017 danutupan hutan alam yang tersisa.



Investigasi lebih lanjut di lapangan oleh LSM mengungkapkan bahwa dua suplier APP di Kalimantan Timur, PT. Fajar Surya Swadaya (FSS) dan PT. Silva Rimba Lestari dari Grup Djarum, membuka hampir 32.000 hektar hutan alam dalam kurun waktu antara tahun 2013 dan 2017.

Terlepas dari klaim APP bahwa tidak ada Konflik Manusia-Hewan, kasus ditemukannya harimau yang mati baru-baru ini di area konsesi APP pada Juni 2020, tampaknya mengulangi kasus serupa yang terjadi sembilan tahun lalu di konsesi perusahaan yang sama. Insiden ini mengkhawatirkan karena 10% dari total populasi harimau Sumatera berada di area konsesi suplier APP. Habitat harimau yang terus berkurang akibat konversi hutan alam dan lahan gambut menjadi hutan tanaman dalam skala besar, diperparah oleh kebakaran hutan, makin

mendesak harimau Sumatera menuju kepunahan dan memperburuk konflik antara manusia dengan harimau.

KONFLIK SOSIAL

“APP akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan mengakui hak atas tanah adat”

Kebijakan Konservasi Hutan

Kebijakan Konservasi Hutan APP juga mengikat perusahaan untuk melakukan “Penyelesaian konflik yang bertanggung jawab”, “Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat adat dan komunitas setempat” dan “menghormati hak asasi manusia”, selain komitmen sosial lainnya. Sejak tahun 2013, hanya ada sedikit perubahan yang dirasakan masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah dengan perusahaan. Ratusan konflik lahan tetap tidak terselesaikan dan APP telah gagal melibatkan masyarakat yang terdampak dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam pengidentifikasian, analisis dan penyelesaian konflik ini.

Pada Forum Perubahan Iklim Indonesia - lokakarya Webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tanggal 5 Juni 2020, Pejabat Keberlanjutan APP, Elim Sribata mengklaim bahwa APP telah menyelesaikan 49% konflik di seluruh wilayah konsesinya. Klaim lain menyatakan bahwa 51% dari konflik yang dipetakan telah diselesaikan. Namun sama seperti sebelumnya, tidak pernah diungkapkan kepada publik bagaimana konflik tersebut diselesaikan dan di mana konflik ini terjadi.

Laporan Konflik Perkebunan Bab I, pemetaan ekstensif konflik sosial di sekitar perkebunan kayu pulp di Indonesia, mengungkapkan bahwa di lima provinsi Indonesia saja, tidak kurang dari 107 desa atau komunitas terlibat konflik aktif dengan perusahaan afiliasi APP atau supliernya, dan 544 desa diidentifikasi sebagai lokasi yang potensial terjadi konflik, dengan luas lebih dari 2,5 juta hektar. Konflik ini setara dengan risiko keuangan yang diperkirakan antara US\$ 5,7 dan US\$ 7,7 miliar dalam bentuk risiko kompensasi sosial.

Pada bulan Maret 2015 seorang petani dan aktivis lokal disiksa dan dibunuh secara brutal oleh tenaga keamanan yang dikontrak perusahaan di sebuah area konsesi yang dikendalikan APP di provinsi Jambi. APP menyebutnya sebagai kecelakaan tetapi, di konsesi yang sama pada tahun 2020, perusahaan menggunakan *drone* untuk mematikan tanaman pangan dan



Walhi Jambi, APP drone

dengan demikian menghilangkan bukti adanya kebun masyarakat setempat yang dikelola secara tradisional pada lahan tersebut, untuk kemudian mengklaimnya. APP juga mengintimidasi desa dengan membawa tentara ke kebun-kebun masyarakat dan melepaskan tembakan ke udara. Perusahaan juga menggunakan cara kriminalisasi dan

tuntutan hukum (dikenal sebagai SLAPP) untuk membungkam anggota masyarakat setempat. Taktik yang sama digunakan pada tahun 2020 oleh perusahaan afiliasi APP yang lain di provinsi Riau, yang menyebabkan anggota masyarakat adat Sakay, Bapak Bongku, mendapat hukuman penjara satu tahun dan denda setara 10 tahun UMR karena menanam ubi jalar di tanah adatnya.⁹

APP juga berjanji untuk “merancang langkah-langkah lanjutan untuk menerapkan FPIC” dan “berkonsultasi dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan protokol dan prosedur FPIC dan resolusi konfliknya sesuai dengan praktik internasional terbaik” dalam komitmen 2013. Namun seluruh perusahaan APP, atau bahkan semua grup perusahaan Grup Sinar Mas telah gagal mengadopsi kebijakan hak asasi manusia yang selaras dengan norma-norma hak asasi manusia internasional yang relevan. Selain itu, APP saat ini tidak memiliki Prosedur Operasi Standar yang tersedia bagi publik, yang merinci bagaimana APP menghormati hak-hak masyarakat dan pemegang hak adat untuk tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) terhadap pembangunan baru dan yang sudah ada di tanah mereka. APP telah menyusun dan menerbitkan Prosedur Operasi Standar untuk FPIC di area penanaman baru pada bulan April 2014, namun secara diam-diam menghapusnya dari situs web APP.

Prosedur Penyelesaian Konflik APP juga tidak memadai dan jauh dari praktik terbaik yang digariskan dalam Panduan Dasar PBB terkait Prinsip-prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) untuk mekanisme pengaduan non-yudisial.

⁹ Elim Sribata, Chief Sustainability Officer of APP, APP at Indonesia Climate Change and Environment Webinar Forum, June 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=W9-rGb3fsv4>. EPN, Conflict Plantations – Chapter 1: Revealing Asia Pulp & Paper’s trail of disputes across Indonesia, October 2019, <https://environmentalpaper.org/2019/10/new-study-reveals-asia-pulp-paper-app-involved-in-hundreds-of-conflicts-with-local-communities-as-haze-crisis-in-indonesia-intensifies/>. EPN, Defaulting on Social Conflict Resolution, May 2020, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2020/04/20200504-Indonesian-Pulp-Paper-Industry-Exposed.pdf> ³⁹ The Guardian, Death of an Indonesian farmer: are companies doing enough to protect local communities? See footnote 3. Mongabay, Conflict between Indonesian villagers, pulpwood firm flares up over crop-killing drone, April 2020, <https://news.mongabay.com/2020/04/conflict-between-indonesian-villagers-pulpwood-firm-flares-up-over-crop-killing-drone/>. Walhi Jambi, 90 NGO Indonesia dan internasional menyurati investor dan pembeli app terkait tindakan peracunan kebun masyarakat desa Lubuk Mandrasah, Jambi, May 2020, <https://www.walhi-jambi.com/2020/05/90-ngo-indonesia-dan-internasional.html>. Resource Centre on Media Freedom in Europe: SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation, December 2019, <https://www.rcmediafreedom.eu/Dossiers/SLAPPs-Strategic-Lawsuits-Against-Public-Participation>. Mongabay, Indonesian court jails indigenous farmer in conflict with paper giant APP, June 2020, <https://news.mongabay.com/2020/06/bongku-indigenous-people-riau-sumatra-indonesia-app-pulp-paper-arara-abadi-prison-sentence-conflict/>

“Pada tahun 2016, perusahaan meluncurkan strategi Pengelolaan Kebakaran Terpadu (IFM) baru yang komprehensif.”

Siaran pers APP

Sementara pembukaan lahan berkurang sejak komitmen APP, kerusakan gambut akibat kebakaran hutan dan gambut justru meningkat. Para suplier dan perusahaan afiliasi APP terlibat dalam kebakaran hutan dan gambut yang terjadi secara masif di Indonesia pada tahun 2015 (walau tidak diakui APP), 2018, dan 2019 dan 2020. Pada tahun 2015, luas area yang terbakar di dalam konsesi APP di Sumatera Selatan mencapai 293.065 ha, dengan sekitar 174.080 ha lahan gambut diantaranya adalah lahan gambut. Di tahun 2019, konsesi APP di Sumatera Selatan juga terbakar dengan total luas area yang terbakar lebih dari 60.000 ha.

Faktanya adalah hutan tanaman di lahan gambut yang dikeringkan menjadi stok bahan bakar yang luas, dan ketika kebakaran hutan dan gambut terjadi di lokasi ini, kebakaran tidak bisa dihentikan. Inilah sebabnya mengapa gambut kering harus segera dibasahi kembali.

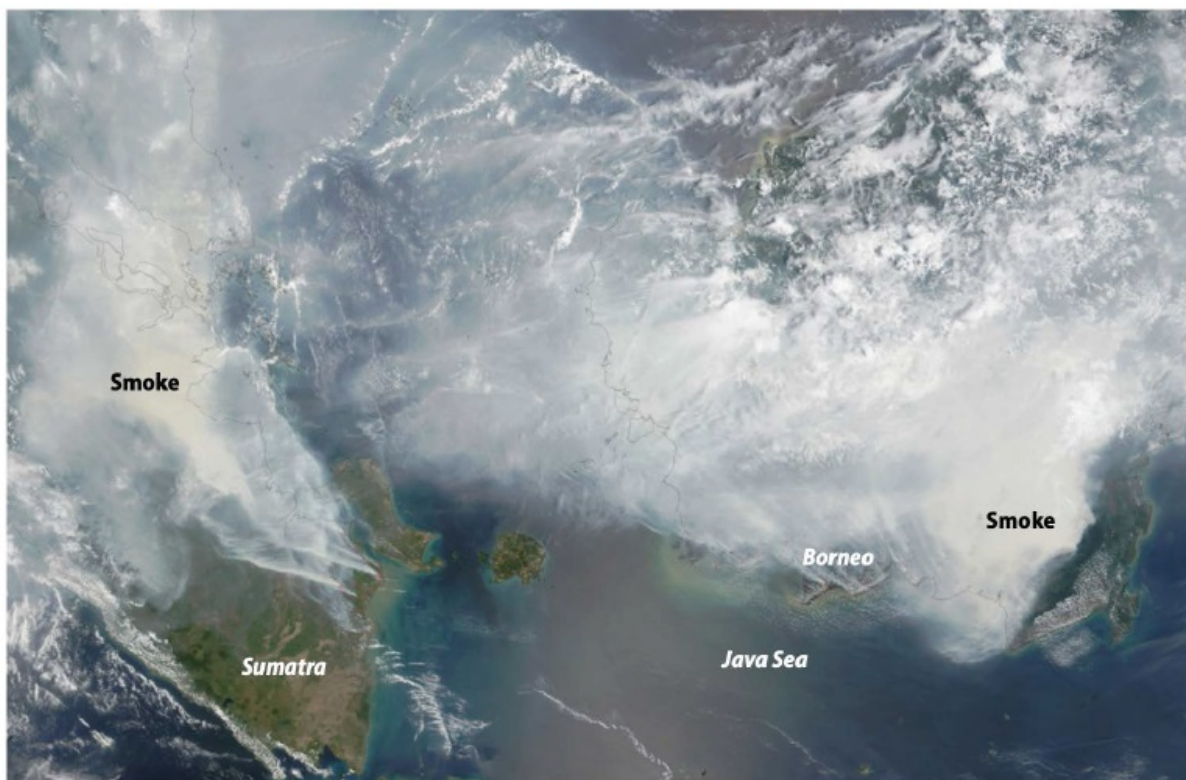
Dampak kebakaran ini sangat mengerikan. Sekitar Oktober-November 2015 APP dinyatakan sebagai salah satu perusahaan yang paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, yang membakar 2,6 juta hektar perkebunan, hutan dan lahan gambut di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua. Diperkirakan 1,75 miliar ton karbon dioksida dilepaskan hanya dalam beberapa bulan, lebih tinggi dari total emisi tahunan Jerman atau Jepang. Emisi harian selama minggu-minggu puncak terjadinya kebakaran melebihi emisi bahan bakar fosil harian dari seluruh perekonomian AS.¹⁰

¹⁰ Eyes on the Forest, These maps, tables show you why Sinar Mas/APP companies linked to forest fires, haze, October 2015, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/these-maps-tables-show-you-why-sinar-mas-app-companies-linked-to-forest-fires-haze>. Eyes on the Forest, Sinar Mas/APP’s denial misleading, they source of haze since ten years ago, October 2015, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/eof-sinar-masapps-denial-misleading-they-source-of-haze-since-ten-years-ago>. Eyes on the Forest, Riau struggles to mitigate forest, land fires, March 2018, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/riau-struggles-to-mitigate-forest-land-fires>. Eyes on the Forest, APP’s suppliers burned again in South Sumatra this year, November 2018, <https://www.eyesontheforest.or.id/news/apps-suppliers-burned-again-in-south-sumatra-this-year>. Jikalahari, Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan: PT Arara Abadi Sengaja Membakar Lahan Seluas 83 hektar Untuk Ditanami Akasia, Juli 2020, <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/dugaan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pt-arara-abadi-sengaja-membakar-lahan-seluas-83-hektar-untuk-ditanami-akasia/>. Hutan Kita Institute, 2015 Fires Burned 26% of APP’s Plantations in South Sumatra, February 2016, <https://hutaninstitute.or.id/pers-release-2015-fires-burned-26-of-apps-plantations-in-south-sumatra/>. GFED, 2015 Fire Season - Indonesian fire season progression, http://www.globalfiredata.org/updates.html#2015_indonesia. The Diplomat, October 2015, The Trouble with Indonesia-Singapore Relations, October 2015, <http://thediplomat.com/2015/10/the-trouble-with-indonesia-singapore-relations/>. The Guardian, Indonesia forest fires: Widodo visit stricken regions death toll mounts, October 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/28/indonesia-forest-fires-widodo-visit-stricken-regions-death-toll-mounts>. The World Bank, The Cost of Fire - an economic analysis of Indonesia’s 2015 fire crisis, February 2016, <http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf>. Coalition Against Forest Mafia, Perpetual Haze, November 2019, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/11/Perpetual-Haze.pdf>. CNN, 5 Pekan Karhutla, 32 Ribu Warga Sumsel Derita ISPA, September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190912074138-20-429746/5-pekan-karhutla-32-ribu-warga-sumsel-derita-ispa>. Kompas, Penderita ISPA di Riau Capai 300.000 Orang, September 2018, <https://kompas.id/baca/utama/2019/09/18/penderita-ispa-di-riau-capai-300-000-orang/>

Kebakaran tersebut menciptakan krisis asap dan kabut yang berdampak di seluruh Asia Tenggara, memicu keadaan darurat nasional di seluruh Indonesia dan meluas ke Singapura, Malaysia dan negara-negara lain, mengakibatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara tetangganya.

Korban manusia dari kejadian ini sangat banyak: 19 orang meninggal dan diperkirakan 500.000 kasus infeksi saluran pernapasan tercatat pada saat kebakaran hutan terjadi. Kebakaran ini juga diperkirakan telah menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dini di wilayah tersebut. Sebuah studi kesehatan masyarakat memperkirakan bahwa 91.600 orang di Indonesia, 6.500 di Malaysia dan 2.200 di Singapura meninggal sebelum waktunya di tahun 2015 akibat paparan polusi partikel halus.

Pengamatan asap kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan oleh satelit Terra NASA pada bulan September dan Oktober 2015.



Sumber: Jeff Schmaltz of NASA's LANCE/EOSDIS di Voiland, Adam. 2015 "Seeing through the smoky pall: Observations from a grim Indonesian fire season." NASA Earth Observatory. 1 Desember. <https://earthobservatory.nasa.gov/features/IndonesianFires>

Kerugian ekonomi dari kebakaran tersebut diperkirakan sekitar US\$16 miliar (Rp 221 triliun), setara dengan 1,9% produk domestik bruto Indonesia. Pada musim kemarau 2019, krisis kebakaran dan kabut asap baru, yang juga terkait dengan hutan tanaman kayu pulp di lahan gambut kering, menyebabkan penutupan ribuan sekolah di seluruh Sumatera, dan hanya di lingkup Sumatera Selatan saja pejabat berwenang melaporkan 32.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut, sementara di Riau lebih dari 300.000 orang menderita sindrom yang sama.

“APP akan mendukung tujuan pembangunan rendah emisi dan target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.”

Kebijakan Konservasi Hutan

Gambut yang kering dan dikeringkan merupakan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat tinggi akibat oksidasi dan meningkatnya kerentanan terhadap pembakaran. Tanpa memperhitungkan kebakaran hutan pun, APP telah bertanggung jawab atas hampir 43,8 juta ton emisi CO₂ setiap tahunnya. Untuk membayangkan angka-angka ini, tidak termasuk kebakaran dan emisi hilir, perkebunan APP di tanah gambut menimbulkan 43 juta ton CO₂ per tahun, hampir setara dengan emisi Norwegia, atau 39 negara di seluruh dunia. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara rata-rata mengeluarkan 3,5 juta ton CO₂ per tahun, sehingga perkebunan suplier APP menghasilkan CO₂ bahkan lebih banyak dibandingkan dua belas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Di bulan Agustus 2015, APP berkomitmen untuk menghentikan kegiatan perkebunannya di 7.000 ha lahan gambut. Namun 7.000 ha ini hanya 1,2% dari 600.000 hektar lahan gambut yang dikuasai oleh APP. Penghentian ini akan menjadi langkah awal yang baik, jika diikuti dengan pembasahan kembali lahan gambut kering dalam skala besar. Pembasahan ini tidak dilakukan, dan kebakaran gambut terus terjadi secara berkala.

Terlepas dari bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hutan tanaman industri di lahan gambut yang dikeringkan membawa risiko yang sangat besar dan tidak berkelanjutan bahkan dengan 'praktik pengelolaan terbaik', APP terus-menerus bergantung pada hutan tanaman di lahan gambut, dengan sekitar 50% konsesi suplier kayu pulp APP berada di lahan gambut.¹¹

¹¹ Susan E. Page et Al, In the line of fire: the peatlands of Southeast Asia, June 2016, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874413/>. EPN, Too Much Hot Air, February 2019, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/02/20170412-Too-much-hot-air-discussion-paper-draft-1.pdf>. Union of Concerned Scientists, Coal and Air Pollution, December 20q7, <https://www.ucsusa.org/resources/coal-and-air-pollution#.WOUEWGe1vIU>. APP, Asia Pulp & Paper commits for commercial plantations on tropical peatland, August 2015, <https://asiapulppaper.com/-/asia-pulp-paper-commits-to-the-first-ever-retirement-of-commercial-plantations-on-tropical-peatland-to-cut-carbon-emissions>. Wetlands International, Encouraging first step, but still a long way to go for APP to stop peat destruction, August 2015, <https://www.wetlands.org/news/encouraging-first-step-but-still-a-long-way-to-go-for-app-to-stop-peat-destruction/>. Lahiru S. Wijedasa, Denial of long-term issues with agriculture on tropical peatlands will have devastating consequences, September 2016, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.13516>. Greenpeace, Greenpeace finds Asia Pulp and Paper guilty of peatland clearance and fuelling forest fires in Indonesia, July 2020, <https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/43721/greenpeace-finds-asia-pulp-and-paper-guilty-of-peatland-clearance-and-fuelling-forest-fires-in-indonesia/>. Jikalahari, Kapolda Riau Cabut Maklumat, Kapolres Pelalawan Tidak Sungkan Segel PT Arara Abadi, July 2020, <https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kapolda-riau-cabut-maklumat-kapolres-pelalawan-tidak-sungkan-segel-pt-arara-abadi/>. Coalition Against Forest Mafia, More peatland fire disasters for Indonesia? February 2019, https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/02/Peatlands-report_Feb-2019-FINAL-1.pdf

Pada Juli 2020, APP diketahui secara aktif membuka 3.500 ha lahan gambut Sumatera untuk membangun hutan tanaman kayu pulp dan menggali kanal drainase sepanjang 53 km, yang secara langsung melanggar komitmennya sendiri untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem yang bernilai karbon tinggi dan mengurangi emisi.

Di bulan Juli 2020, LSM yang berbasis di Riau, Jikalahari, mengajukan gugatan kriminal ke Kepolisian Indonesia terhadap anak perusahaan APP, PT Arara Abadi. Rekaman *drone* lokasi geografis yang diambil pada tanggal 3 Juli, seminggu setelah kebakaran terjadi di dalam area konsesi perusahaan menunjukkan area lahan gambut yang siap untuk ditanami dalam keadaan masih membara. Citra satelit menegaskan bahwa wilayah tersebut masih berupa hutan pada bulan Januari, dan telah dibuka dan dikeringkan pada bulan-bulan sebelum pembakaran. Data hotspot menunjukkan pembakaran ini terjadi pada 28 Juni. Area yang terbakar di dalam konsesi Arara Abadi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Indonesia, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap komitmen dan kebijakan publik APP. Arara Abadi adalah pelanggar yang berulang kali mengalami kebakaran di area konsesinya setiap tahun sejak 2015, dengan total area yang terbakar diperkirakan lebih dari 12.000 ha.

RESTORASI DAN KOMPENSASI

“Grup Asia Pulp and Paper (APP) hari ini mengumumkan rencana untuk merestorasi dan mendukung konservasi satu juta hektar hutan hujan di seluruh Indonesia.”

Rilis APP

Pada bulan April 2014, APP mengumumkan program untuk memulihkan dan mendukung konservasi satu juta hektar hutan hujan dan ekosistem lainnya di 10 lanskap di Indonesia, sebagai langkah untuk memperbaiki pembukaan hutan alam yang signifikan di masa lalu yang ditimbulkan oleh rantai suplai APP. Pengumuman tersebut disambut dengan hati-hati oleh Greenpeace, WWF dan RAN. Namun janji ini tetap hanya janji di atas kertas tanpa rincian penting tentang cara penghitungan pencapaian target, pendekatan yang akan digunakan, metode pengukuran progres, dan bagaimana komitmen ini akan dilaksanakan. Enam tahun setelahnya, masih belum ada rencana yang jelas dan sangat sedikit progres yang dicapai dalam pelaksanaan komitmen restorasi ini. Bahkan aksi prioritas yang dijanjikan APP untuk menyelamatkan lanskap Bukit Tigapuluh pun tidak dilaksanakan.¹²

¹² APP, Protection and restoration of one million hectares of forest in Indonesia, April 2014, <https://asiapulppaper.com/-/app-to-support-the-protection-and-restoration-of-one-million-hectares-of-forest-in-indonesia>. Greenpeace, APP to “protect and restore” 1 million hectares of forests, April 2014, <https://www.greenpeace.org/usa/app-protect-restore-1-million-hectares-forests/>. Wwf, WWF responds to ambitious APP plan for restoration and conservation of one million hectares, April 2014, <https://wwf.panda.org/?220352/WWF-responds-to-ambitious-APP-plan-for-restoration-and-conservation-of-one-million-hectares>. RAN, RAN Welcomes APP’s Commitment to Restore One Million Hectares of Rainforest, April 2014, <https://www.ran.org/press-releases/ran-welcomes-app-s-commitment-restore-one-million-hectares-rainforest/>. APP, APP shares its milestones to provide long term solution to fires, November 2015, <https://asiapulppaper.com/-/app-shares-its-peatland-management-milestones-to-provide-long-term-solution-to-fires>. APP, Forest Conservation Policy Progress Update – Conservation, March 2019, <http://www.fcpmonitoring.com/Pages/OpenPDF.aspx?id=1427>

Satu-satunya pencapaian nyata adalah penghentian kegiatan operasional 7.000 hektar hutan tanaman produktif di lahan gambut di tiga wilayah konsesi terpisah, dan dimulainya restorasi di 5.000 hektar hutan terdegradasi atau hanya sekitar 1,2% dari 1 juta hektar lahan yang seharusnya direstorasi seperti yang mereka janjikan kepada publik.

PROSEDUR ASOSIASI

Setiap suplier yang saat ini bekerja sama atau akan bekerja sama dengan APP harus memenuhi Kebijakan Pengadaan dan Pemrosesan Serat yang Bertanggung Jawab dan Kebijakan Konservasi Hutan. Berdasarkan Prosedur Asosiasi ini, semua aktivitas suplier yang melanggar kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, didefinisikan sebagai Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima. (...) Dalam hal calon suplier telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pembukaan hutan alam setelah tanggal efektif FCP APP (1 Februari 2013)¹³

Prosedur Asosiasi

Pada Mei 2014, dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan, APP mengembangkan sebuah prosedur untuk mengevaluasi calon supliernya. Prosedur yang kemudian disebut Prosedur Asosiasi untuk Menerapkan Komitmen Zero Deforestasi dalam Rantai Suplai APP, menyatakan bahwa “berdasarkan Prosedur Asosiasi ini, setiap aktivitas suplier yang melanggar kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, didefinisikan sebagai Aktivitas yang Tidak Dapat Diterima”. Prosedur ini melarang suplier terlibat dalam aktivitas deforestasi setelah tanggal berlakunya Kebijakan Konservasi Hutan APP (1 Februari 2013), termasuk kebijakan pengadaan dan pemrosesan serat yang bertanggung jawab yang berlaku sebelumnya dan bersifat lebih umum.¹⁴

Prosedur asosiasi secara diam-diam dihapus dari situs web APP setelah banyak LSM mengkritik APP atas pelanggaran prosedur ini. Pada Mei 2019, prosedur asosiasi digantikan oleh “kebijakan pengadaan & pemrosesan serat yang bertanggung jawab” yang jauh lebih longgar. APP mengatakan bahwa suplier tetap harus mematuhi komitmennya, tetapi kebijakan baru ini tidak melarang pembukaan hutan bernilai karbon tinggi (sesuai Pendekatan Stok Karbon Tinggi, HCSA78), tidak melarang pembangunan di lahan gambut, serta tidak menghentikan kerjasama dengan segera saat suplier ditemukan melanggar kebijakan. Selain itu, tanggal batas akhir 1 Februari 2013 untuk tindakan yang bertentangan dengan standar kebijakan APP terkait Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) telah

¹³ APP, Association Procedure For implementing a No-Deforestation commitment in APP's Supply Chains, May 2014, temporary stored at <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2020/06/APP-Association-Procedure-ENG.pdf>

¹⁴ EPN and others, Association with new suppliers in Bangka Belitung, PT. Bangun Rimba Sejahtera (BRS), March 2017, <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2017/03/20170317-letter-to-APP-on-PT-BRS.pdf>. APP, App Responsible Fibre Procurement & Processing Policy, May 2019, https://asiapulp.com/documents/20123/0/app_responsible_fibre_procurement_processing_policy_-_srv_2020.pdf/e673cd3f-49d5-bb45-7bc8-5d9cebe1dc64?t=1575879683942. The HCS Approach Toolkit, May 2017, <http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>. Rainforest Alliance, An Evaluation of Asia Pulp & Paper's Progress, see footnote 14. APP, Sustainability Report 2014 https://sustainability-dashboard.com/documents/20123/0/app_sr_2014_interactive_v2.pdf/ae1efd86-3d8c-4b81-ca31-fa11200483cb?t=1575880200688

dibatalkan. Untuk sumber-sumber internasional, kebijakan baru ini hanya mensyaratkan kepatuhan hukum dan dokumentasi rantai kustodi.

Prosedur asosiasi disebutkan oleh *Rainforest Alliance* dalam Evaluasi Kemajuan Asia Pulp & Paper dalam Memenuhi Kebijakan Konservasi Hutannya dan dalam Laporan Keberlanjutan APP 2014, dan salinannya telah disimpan oleh EPN.

TRANSPARANSI

Di antara ikrar-ikrar APP yang lain, kami berkomitmen untuk menerapkan transparansi secara menyeluruh.

Ringkasan Satu Tahun Kebijakan Konservasi Hutan APP

Sebelum dan sesudah pengumuman FCP 2013, APP memberikan informasi yang menyesatkan para pemangku kepentingannya terkait tentang hubungan perusahaan dengan 27 suplier kayu, yang merupakan mayoritas basis hutan tanamannya, dengan menyatakan ke-27 suplier ini sebagai perusahaan “independen,” dan menutupi hubungan APP dengan setidaknya 25 dari perusahaan suplier ini. Sebuah laporan LSM yang diterbitkan pada bulan Mei 2018 mengungkapkan struktur perusahaan tersembunyi yang menghubungkan APP dengan para suplier serat “independennya”.

Saat kebakaran tahun 2015 berlangsung, APP menggunakan klaim “independen” ini untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebakaran besar-besaran di wilayah konsesi dekat pabrik barunya. Selain PT. Muara Sungai Landak yang disebutkan di atas, pada Desember 2017 *Associated Press* dan *Straits Times* juga melaporkan hubungan tersembunyi SMG/APP dengan perusahaan lain, PT Bangun Rimba Sejahtera, yang berencana mengkonversi lahan masyarakat menjadi hutan tanaman, meskipun terjadi penolakan dari penduduk desa.

Sejak pengumuman FCP, APP juga telah menyesatkan pemangku kepentingan terkait informasi mendasar untuk penerapan kebijakannya: kapasitas produksi pabrik OKI yang sebenarnya. APP telah membangun pabrik yang jauh lebih besar daripada kapasitas yang dinyatakan sebelumnya, tanpa memberikan bukti akan adanya pasokan kayu yang lestari.¹⁵

Pada bulan September 2014, APP mengklaim dalam “*FCP Update*” bahwa mereka telah menyelesaikan proses FPIC di PT. OKI Mill Pulp and Paper. Namun, asesmen yang dilakukan

¹⁵ APP, APP Forest Conservation Policy One Year Summary, 2014, <https://it.scribd.com/document/220314953/APP-Forest-Conservation-Policy-One-Year-Summary>. Coalition Against Forest Mafia, Removing the Corporate Mask. The Straits Times, Asia Pulp & Paper: Suspended suppliers independently owned, December 2015, <https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/asia-pulp-paper-suspended-suppliers-independently-owned>. Associated Press, AP Exclusive: Pulp giant tied to companies accused of fires, December 2017, <https://apnews.com/article/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>. The Straits Times, Rebutting media reports, pulp giant APP claims links to suppliers do not weaken its sustainability efforts, December 2017, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/rebutting-media-reports-pulp-giant-app-claims-links-to-suppliers-do-not-weaken-its>. Walhi Bangka Belitung and others, Local Communities Reject PT. Bangun Rimba Sejahtera, Potential Supplier to APP’s OKI Mill, March 2017, <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/private/news/2017/03/Investigation%20Report%20-%20Potential%20APP%20Supplier%20PT%20BRS%20Rejected%20by%20Local%20Communities%20Final.pdf>.

Yayasan Wahana Bumi Hijau pada tahun 2014 menyimpulkan bahwa “Partisipasi dalam proses FPIC masih terbatas; informasi yang diberikan tidak memadai dan tidak diberikan secara tertulis; persetujuan tertulis dari sebagian besar anggota masyarakat atau kelompok yang berpotensi terdampak oleh proyek belum diperoleh; izin untuk pendirian pabrik dan pembangunan pabrik dimulai sebelum persetujuan dari setidaknya sebagian masyarakat yang berpotensi terkena dampak dengan hak yang jelas atas FPIC (misalnya Sungai Rasau dan Bukit Batu) diberikan.”

APP menolak untuk membagikan atau membuat peta kawasan hutan HCS, studi dan peta lahan gambut, data pemetaan partisipatif klaim tanah masyarakat dan adat, serta data rinci tentang pemetaan konflik sosialnya tersedia bagi publik. Beberapa di antara data-data ini telah dibagikan tetapi dengan cara yang sangat selektif. Pada Oktober 2019, komitmen APP terhadap transparansi menyeluruh menyempit menjadi penawaran untuk berbagi informasi di “ruang tertutup di kantor kami.”

Sejak tahun 2013, APP belum menunjuk [pihak ketiga] untuk melakukan verifikasi yang benar-benar independen atas kemajuan yang telah dicapai APP terhadap tujuan yang dijanjikannya menggunakan seperangkat indikator yang kredibel untuk mengukur kepatuhan, seperti Kriteria dan Indikator yang dikembangkan oleh LSM. APP hanya terus mengklaim progresnya dalam menerapkan berbagai aspek kebijakan melalui komunikasi atau kampanye pemasaran, kunjungan pembeli, pertemuan Forum Penasihat Pemangku Kepentingan atau melalui *endorsement* yang dibuat oleh pihak kedua seperti Earthworm Foundation, sebelumnya The Forest Trust, yang dibayar langsung oleh perusahaan untuk jasa ini. Pendekatan yang digunakan untuk melaporkan progres dalam mengimplementasikan komitmennya hanyalah laporan sendiri, yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan.¹⁶

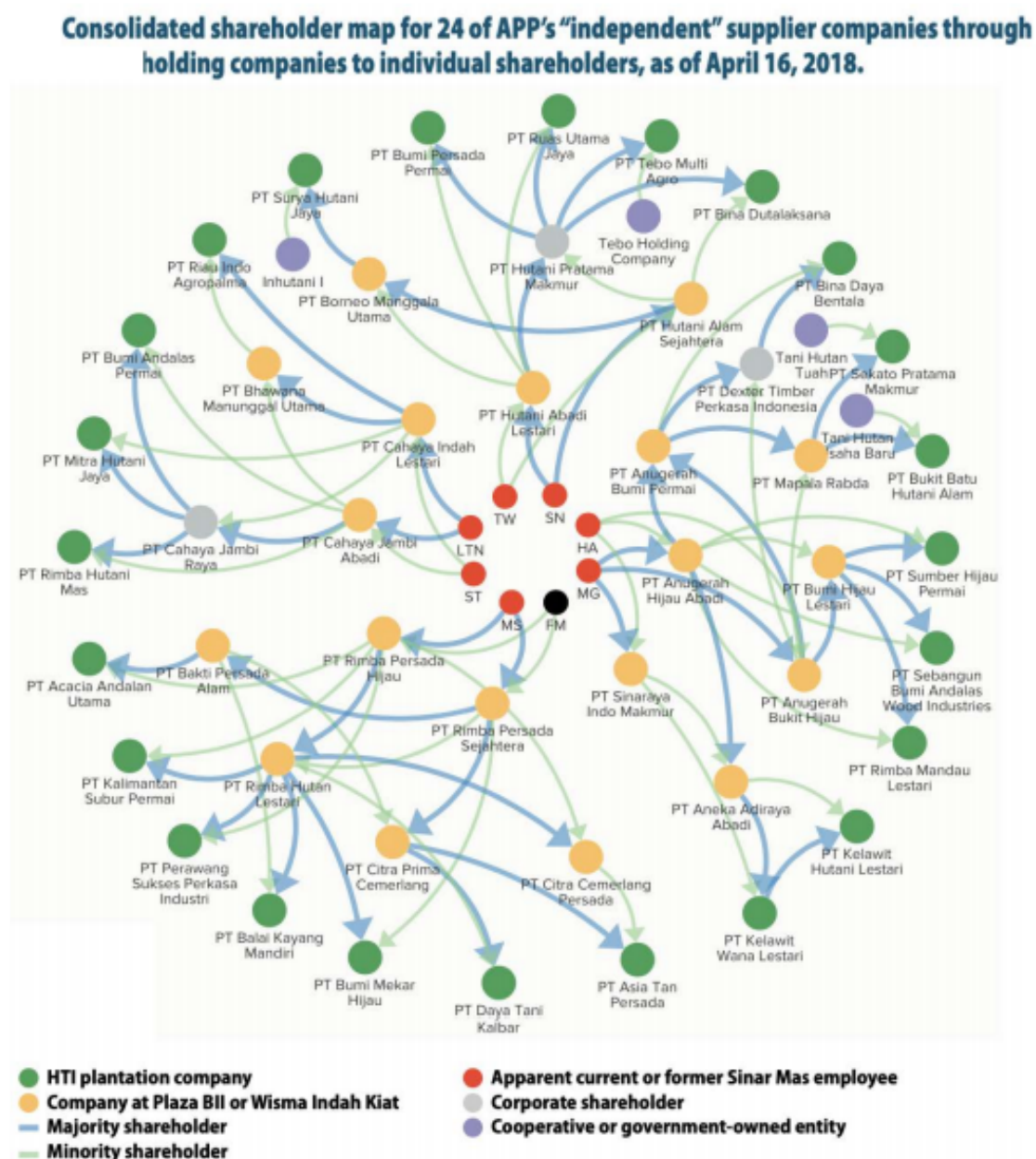
Penolakan APP untuk sepenuhnya transparan juga membatasi upayanya untuk mendapatkan sertifikasi melalui *Forestry Stewardship Council*. Pada tahun 2017, FSC, yang sepuluh tahun sebelumnya telah memisahkan diri dari APP karena praktik kehutanan yang merusak - memulai proses untuk mengembangkan peta jalan yang dapat mengakhiri disasiasinya dengan APP. Namun, pada Agustus 2018, FSC terpaksa menunda proses tersebut karena “[kurangnya] informasi lebih lanjut dari APP terkait struktur perusahaannya dan dugaan kegiatan pengelolaan hutan yang tidak dapat dibenarkan oleh perusahaan-perusahaan yang diperkirakan berhubungan dengan APP”.

¹⁶ The Straits Times, APP mill can produce far more than expected, stoking worries, June 2017, <https://www.straitstimes.com/singapore/environment/app-mill-can-produce-far-more-than-expected-stoking-worries>. Mongabay, Dua Tahun Komitmen APP, FPIC dan Penyelesaian Konflik Masih Rendah, February 2015, <https://www.mongabay.co.id/2015/02/07/dua-tahun-komitmen-app-fpic-dan-penyelesaian-konflik-masih-rendah/>. Eco-Business, Asia Pulp & Paper involved in numerous land disputes, shirking demands for more transparency — report, October 2019, <https://www.eco-business.com/news/asia-pulp-paper-involved-in-numerous-land-disputes-shirking-demands-for-more-transparency-report/>. Auriga and others, Evaluating the Environmental, Social and Corporate Governance Performance of Sinar Mas Group (SMG) and Royal Golden Eagle (RGE) Companies, November 2017, https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2017/11/Criteria_Indicators_for_Assessing_Verifying_SMG_and_RGE_Performance_15Nov17_2.pdf. FSC, APP Roadmap Process, August 2018, <https://fsc.org/en/newsfeed/app-roadmap-process>. APP, Summary of Grievances, March 2020, <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/126817/200306+Grievance+List.pdf/c6c49c6e-1e96-46b2-e620-cb52ebcbf07c?t=1592281470497>

APP telah menerbitkan daftar keluhan tetapi menolak untuk memasukkan semua komplain yang diajukan oleh masyarakat yang terdampak, atau yang diajukan oleh LSM lokal yang mendukung masyarakat, juga tidak memberikan detail terkait tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan keluhan dan mengembalikan tanah kepada masyarakat yang hak adatnya dilanggar ketika APP membangun hutan tanaman di lahan masyarakat.

APP menerbitkan daftar supliernya di dasbor keberlanjutan [pada web] yang diklaim telah melalui Evaluasi Suplier dan Penilaian Risiko yang ketat tetapi tidak mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan.

APP juga meluncurkan sistem pemantauan baru pada Juli 2020 tetapi terbatas pada peta kawasan konservasi dan batas konsesinya. Area produksi dihilangkan dan peta yang disediakan beresolusi rendah dan tidak dapat diunduh.



Source: Corporate registry documents, Ditjen AHU, Ministry of Law and Human Rights, From "Removing the Corporate Mask" report.

REKOMENDASI UNTUK KLIEN, PEMBERI MODAL, DAN INVESTOR APP

Lembaga sosial masyarakat Indonesia dan anggota *Environmental Paper Network* lainnya mendesak dengan sangat agar para klien APP, pembeli akhir produk kertas atau minyak kelapa sawit, pemberi modal dan investor untuk mengakhiri [transaksi] dan tidak membuat bisnis baru dengan APP dan merek-mereknya – termasuk semua perusahaan yang terkait dengan konglomerasi Sinar Mas dan Paper Excellence, dan perusahaan afiliasinya yang dikendalikan oleh pemilik APP, keluarga Widjaya, hingga kegagalan APP dalam memenuhi komitmen sebagaimana diuraikan dalam laporan ini dan dirangkum dalam poin-poin di bawah ini diselesaikan sepenuhnya dan tindakan berikut dilaksanakan.

APP dan mereknya serta grup perusahaan Sinar Mas dan Paper Excellence harus melakukan hal-hal berikut.

- Mempublikasikan kebijakan yang lebih baik dan kredibel terkait zero deforestasi, tanpa konversi/degradasi ekosistem dan lahan gambut, tanpa eksploitasi, dengan rantai pasokan dan investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, yang diterapkan di seluruh kegiatan operasi Grup Perusahaan secara global. Kebijakan ini harus mencakup komitmen konservasi dan restorasi ekosistem alam [yang dinyatakan] secara eksplisit termasuk pembiayaan pekerjaan konservasi dan restorasi dan ganti rugi atas kerusakan sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan.
- Menerapkan kebijakan ini di semua area sumber bahan baku dan area non-produksi yang berada di bawah kendali grup perusahaan dan suplier dalam rantai pasokan global, bisnis perdagangan, dan investasinya.
- Mengungkapkan informasi yang memadai mengenai semua area yang relevan untuk penerapan kebijakan termasuk informasi tentang: area sumber bahan baku dan cadangan lahan, data ketertelusuran (*traceability*), area konservasi, dan Penduduk Asli dan komunitas lokal yang terdampak dan berada di bawah kendali grup perusahaan dan suplier dalam rantai pasokan globalnya dan investasi. Mempublikasikan dan membagikan informasi ini kepada sistem pemantauan yang transparan dan kolaboratif yang dapat diakses oleh publik dan dapat mewartakan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan verifikasi independen yang kredibel.
- Menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan ini melalui, setidaknya, publikasi tahunan mengenai hasil verifikasi yang benar-benar independen dan kredibel yang diukur berdasarkan Kriteria dan Indikator yang diterbitkan LSM. Langkah ini harus dilakukan di semua lini operasi, area sumber bahan baku dan cadangan lahan yang dikendalikan grup perusahaan, dan suplier dalam rantai pasokan dan investasi globalnya, serta diimplementasikan dengan target, aksi, dan hasil nyata berbatas waktu yang diuraikan dalam kebijakan tersebut.
- Menetapkan dan memastikan pemegang hak dan pekerja memiliki akses ke mekanisme pengaduan dan prosedur penyelesaian konflik yang efektif.

Tindakan berikut juga harus ditetapkan sebagai prasyarat dan harus dinyatakan telah terlaksana melalui verifikasi secara independen sebelum dimulainya kembali bisnis:

- Menjamin tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak dan pembela hak asasi manusia, lahan dan lingkungan.

- Sepenuhnya melaksanakan komitmennya untuk menghindari atau menyelesaikan konflik sosial melalui prosedur penyelesaian konflik yang lebih baik dan sejalan dengan praktik internasional terbaik sebagaimana diuraikan dalam Panduan Dasar PBB terkait Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), dan prinsip mekanisme pengaduan non-yudisial.
- Menjalankan komitmennya untuk menghormati persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat yang terdampak konsesi yang sudah ada dan pembangunan konsesi baru dan menerbitkan Prosedur Operasi Standar FPIC yang konsisten dengan Persyaratan Sosial dan Panduan Pelaksanaan HCSA.
- Menghentikan dengan segera aktivitas perusahaan di lahan yang disengketakan sampai ada penyelesaian konflik sosial dan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan perusahaan untuk mencapai kesepakatan bersama antara masyarakat yang dirugikan dan perusahaan, serta melaksanakan dan mempublikasikan hasil pemetaan partisipatif masyarakat dan tanah adat masyarakat yang terdampak kegiatan operasional perusahaan (terlepas dari sengketa yang ada). Pemetaan partisipatif harus dilakukan sesuai dengan Persyaratan Sosial dan Pedoman Pelaksanaan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA).
- Benar-benar melaksanakan semua komitmennya, termasuk janji untuk memulihkan dan melindungi satu juta hektar hutan hujan di Indonesia, menghentikan penggunaan serat dari kegiatan deforestasi, melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi dan hutan bernilai karbon tinggi serta melindungi lahan gambut dari kekeringan dan pembangunan, tanpa memandang kedalaman gambut tersebut.
- Menyelesaikan *peer review* atas semua asesmen HCSA dan menerapkan semua rekomendasi untuk memastikan asesmen tersebut sesuai dengan Perangkat HCSA.
- Menerapkan kembali Prosedur Asosiasi, atau mewajibkan semua suplier pulp atau serat dari Indonesia dan Internasional untuk mematuhi persyaratan zero deforestasi, tanpa konversi/degradasi ekosistem dan gambut mulai tanggal 1 Februari 2013. Perusahaan yang berada di wilayah tropis harus menerapkan HCSA untuk semua pembangunan [hutan tanaman] baru yang melibatkan perubahan tata guna lahan.
- Mengadopsi dan mempublikasikan rencana yang akuntabel dan terikat waktu untuk meniadakan hutan tanaman kayu pulp secara bertahap di lokasi lahan gambut, yang mencakup mekanisme verifikasi independen.
- Mempublikasikan informasi rinci tentang struktur perusahaan dan relasinya baik langsung dan tidak langsung dengan suplier serat, anak perusahaan dan merek, dan membagikan dokumen yang relevan seperti rencana pasokan kayu jangka panjang yang dapat diverifikasi untuk pabrik pulp APP, HCV, HCS, dan studi gambut.